

SP25-02-004

• TOPIK EMPU •



Ada banyak definisi mengenai lanjut usia (lansia). Namun selama ini kebanyakan definisi lansia lebih didasarkan pada patokan umur semata. Sebenarnya hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Selain faktor usia, masih ada faktor-faktor lain yang berkaitan dengan ketuaan seseorang seperti faktor kesehatan tubuh, faktor psikologis, dan juga faktor sosial yang terjadi pada orang yang bersangkutan.¹ Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan tegas dinyatakan bahwa yang disebut sebagai lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih. Usia 60 tahun merupakan usia yang rawan bagi manusia. Dalam usia ini, kemampuan fisik dan kognitif manusia sangat menurun. Hal itu nantinya

juga berakibat pada berkurangnya tingkat produktivitas manusia. Dalam usia ini pula, idealnya manusia tersebut tidak terlalu dibebani dengan persoalan finansial yang akan melibatkan banyak otak dan pikiran.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1998 menunjukkan bahwa sebanyak 3.485.056 (25, 31%) orang lansia masuk dalam kondisi terlantar dan 4.975.942 (36, 4%) termasuk lansia rawan terlantar. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah para lansia yang tidak terjamin kehidupannya secara ekonomi, demikian juga dengan kesehatan dan kebutuhan dasarnya seperti tempat tinggal dan pangan.

Oleh karena itu, untuk menghadapi masa tua diperlukan sebuah persiapan yang matang. Tidak hanya siap secara psikologis, tapi juga secara finansial. Para lansia yang sudah memiliki keterbatasan fisik dan mental itu idealnya tidak perlu lagi menggunakan kemampuan otak dan fisiknya terlalu *ngoyo*. Secara psikologis, banyak lansia yang mengalami stress bahkan depresi karena harus mencari nafkah di usianya yang sudah lanjut. Kenyataan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa 55,7 % lanjut usia masih menjadi kepala rumah tangga. Bahkan, 68% diantaranya masih aktif bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Data BPS tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 80% dari warga lansia tidak memiliki pensiun dan asuransi kesehatan (Askes).

Menurut dr. E. Oswari, DPH, ada tiga syarat agar para lansia dapat menikmati masa pensiunnya dengan bahagia dan bisa menguntungkan dalam usia senja mereka tersebut. Ketiga syarat itu masing-masing adalah bahwa setiap pensiunan perlu mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal yang layak, dan pegangan hidup baru untuk menggantikan tujuan hidup ketika masih aktif bekerja dulu.² Untuk menyongsong usia tua, faktor keuangan memang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan karena pada usia lanjut, kemampuan untuk mencari uang juga lebih terbatas karena kekuatan fisik yang juga semakin berkurang. Disamping itu masa kerja pun juga dibatasi.

Untuk itulah tabungan hari tua sangat diperlukan guna membantu para lansia menghidupi dirinya di usia senja. Maka hendaknya setiap penduduk ketika masih dalam kategori usia produktif idealnya menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan wajib (*social*

security saving/social insurance). Persiapan secara finansial ini sangat diperlukan agar pada usia lanjut tidak lagi menjadi beban bagi orang lain atau pun bagi keluarganya.

Betapapun, budaya masyarakat telah menempatkan para lansia dalam posisi yang terhormat. Namun tetap tak dipungkiri bila dalam kenyataan sehari-hari posisi lansia dalam segi ekonomi cenderung direndahkan. Akses mereka ke pasar produktif sangat terbatas. Jika ada sebutan masyarakat miskin, maka hampir bisa dipastikan bahwa yang paling menderita dan yang paling miskin adalah para lansia. Nilai-nilai kebendaan dan nilai-produktivitas juga membuat lansia semakin tersisih dalam situasi ekonomi. Kekhawatiran ini membuat beban lansia menjadi semakin berat.³

Perempuan dan Minimnya Penghasilan

Dari berbagai laporan penelitian, bahkan secara *common sense* saja, terungkap bahwa ketidakseimbangan penghasilan telah terbentuk saat perempuan memasuki lapangan kerja. Hal ini seperti kelas yang telah lama tercipta di dalam masyarakat, proses sosial dan politik yang telah menempatkan perempuan pada lapis kedua. Dalam pembagian kerja misalnya, sektor domestik lebih banyak dipegang oleh perempuan sehingga membuat perempuan tidak terlalu berperan disektor publik. Akibatnya perempuan tidak mempunyai pensiun di hari tuanya karena pekerjaan mereka hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan pendapatan.⁴ Perempuan lebih banyak bergerak seputar pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Padahal pekerjaan itu menuntut perempuan harus bekerja keras. Dalam hal ini tidak ada penghargaan finansial resmi sebagaimana layaknya yang diterima oleh seorang karyawan dari suatu perusahaan.

Di Amerika, 75% lansia perempuan berada dalam kondisi miskin.⁵ Kondisi mereka diperparah lagi dengan kenyataan adanya diskriminasi rasial. Perempuan kulit putih walau mendapatkan tempat utama, tetap saja berpenghasilan lebih rendah daripada pria kulit putih. Sementara itu, perempuan *hispanik* (Kulit berwarna) dan kulit hitam berada pada urutan di bawah perempuan kulit putih dalam segi penghasilan.

Kemiskinan yang terjadi dikalangan perempuan disebabkan juga karena distribusi keuangan yang tidak merata dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan terbentuk oleh usia dan gender. Seperti di Inggris,

pensiun yang diberikan kepada perempuan relatif lebih sedikit karena perempuan selalu dikaitkan dengan status pernikahan-dalam hal ini mereka selalu digambarkan sebagai pihak yang "ikut" suami dan identik dengan tugas-tugas "keibuan"- dan juga posisinya yang ada pada urutan kedua dalam dunia kerja. Masih banyak dapat dijumpai pekerja perempuan yang dibayar lebih rendah dari laki-laki, padahal perempuan-perempuan tersebut mempunyai beban kerja yang sama dengan laki-laki.⁶

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja pada abad ini meningkat dengan cepat, namun partisipasi perempuan tersebut menurun secara dramatis pada saat mulai menginjak usia di atas 45 tahun.⁷ Kebanyakan perempuan usia tersebut dengan alasan disibukkan dengan pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga. Suatu gambaran yang dikondisikan memiliki hingga dianggap sebagai rawat anak dan sosok dan secara tidak langung lebih memilih pekerjaan-dekati sifat-sifat tersebut.



dan mengurus anak. umum bila perempuan sifat-sifat keibuan se-orang yang harus me-yang penuh kasih sayang membuat perempuan pekerjaan yang men-

Hal-hal yang dikemukakan di atas secara tidak langsung akan berimplikasi pada pensiun yang akan mereka terima. Kontribusi mereka yang kecil mengakibatkan uang pensiun yang mereka terima pun relatif lebih sedikit. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak peduli untuk mengurus hak-haknya secara administratif, seperti tabungan hari tua mereka, sehingga otomatis mereka tidak dapat memperoleh pensiun di hari tuanya.

Ketergantungan finansial perempuan terhadap laki-laki berlanjut hingga menginjak usia lanjut. Bila di usia muda mereka banyak mengandalkan penghasilan suami, maka di masa tuanya pun mereka juga akan bergantung pada pensiun yang diterima suami karena perempuan seperti ini memang tidak mempunyai penghasilan sendiri. Kondisi seperti ini diperparah lagi dengan adanya uang kebijakan sosial beserta program-program pensiun yang didesain dengan pola pikir pekerja laki-laki. Misalnya, perempuan dalam status sudah menikah, maka perempuan tersebut dianggap sebagai satu obyek dengan suami.

Dan perempuan, yang dipandang sebagai pihak yang bergantung pada suami adalah perempuan yang tidak mempunyai *social security credit* atas posisinya sebagai ibu rumah tangga.

Pensiun Bagi PNS: Jaminan yang lebih pasti

Di Indonesia, ada beberapa cara untuk mempersiapkan masalah finansial di masa tua. Bagi mereka yang berstatus pegawai negeri, usia tua tidaklah menjadi "terlalu bermasalah." Hal itu dikarenakan adanya jaminan yang pasti mengenai dana pada usia tua yang disebut: dana pensiun. Dana itu dikelola oleh PT Taspen sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengelola keuangan dana pensiun pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN termasuk juga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Dana pensiun pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN/BUMD berasal dari potongan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN/BUMD setiap bulannya. Besarnya potongan rata-rata 2,5% dari jumlah gaji mereka. Pada masa pensiun nanti para PNS dan pegawai BUMN/BUMD tinggal mengurus masalah administrasi ke kantor mereka masing-masing dan juga ke kantor cabang PT Taspen terdekat. Besarnya uang pensiun adalah 2,5% selama masa kerja dikalikan gaji pokok terakhir, maksimal 75% dan minimal 40% dari gaji pokok terakhir. Pembayaran uang pensiun dilakukan setiap bulan. Lokasi pengambilan uang pensiun bisa dilakukan di Kantor Pos atau melalui transfer ke bank yang bersangkutan. Pensiun ini juga dapat diterima oleh janda/ duda dari pensiunan PNS, BUMN/BUMD atau orang tua maupun yatim piatu

dari pensiunan tersebut. Terlepas dari jumlah dana pensiun yang diterima oleh para pensiunan, setidaknya jaminan dana pensiun yang diberikan dapat memberikan efek psikologis yang menyenangkan. Hal itulah yang menjadi alasan mereka menjadi PNS atau pegawai BUMN/BUMD. Masa tua dengan dana pensiun yang pasti dan terjamin, suatu hal yang tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pada masa tua mereka.



Dok. YIP



Dok. YIP

Di Indonesia, untuk kalangan pegawai negeri sendiri tidak ada perbedaan antara jumlah uang pensiun perempuan dan laki-laki. Demikian pula bagi pasangan masing-masing yang telah meninggal. Dalam hal ini, baik janda maupun duda mendapat uang pensiun dalam jumlah yang sama. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa belum banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis yang secara finansial menghasilkan nilai yang lebih besar. Padahal faktor inilah yang berpengaruh terhadap besarnya dana pensiun yang nantinya akan diterima oleh perempuan tersebut. Di sini terlihat jelas masih adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan akan lebih sulit menyisihkan uangnya untuk hari tua nanti.

Asuransi atau Bank?

Bagi mereka yang bekerja di sektor swasta, dana pensiunan memang belum seluruhnya dijamin. Namun bukan berarti bahwa mereka tidak bisa menikmati dana pensiun. Di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini, dapat terlihat semakin maraknya berdiri lembaga dana pensiun yang dikelola oleh swasta. Lembaga dana pensiun swasta ini umumnya dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang perbankan atau perasuransian. Sebagaimana layaknya pegawai negeri yang gajinya dipotong setiap bulannya untuk dana pensiun, maka jasa asuransi seperti ini juga menuntut iuran dari para kliennya. Iuran per-bulan disebut dengan premi dan besarnya premi bersifat bebas, bisa disesuaikan dengan keuangan bulanan dari para klien. Dalam hal ini klien pun bisa menentukan jumlah uang pensiun yang akan diterimanya kelak. Bila mereka menginginkan jumlah uang pensiun dalam jumlah yang relatif besar, maka premi yang dikenakan pun jumlahnya akan lebih besar pula. Waktu penggunaan dana pensiun pun dapat diatur. Ada berbagai paket pilihan yang disediakan oleh pihak jasa asuransi. Umumnya klien bisa menerima dana tersebut setelah umur 55 tahun atau 60 tahun.

Bagi perusahaan yang lebih besar, mereka mengelola dana pensiun atau lebih sering disebut tabungan hari tua secara kolektif. Artinya, sistem penarikan dana pensiun sama seperti yang diberlakukan pada pegawai negeri. Bedanya ada pada uang yang ditarik dari karyawan tersebut, tidak diserahkan kepada PT Taspen, namun diserahkan langsung kepada lembaga dana pensiun swasta. Peraturan selengkapny tentang informasi

mengenai dana pensiun termasuk pengelola dana pensiun tersebut diatur melalui Undang undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam UU itu disebutkan bahwa dana pensiun yang terhimpun tidak diperkenankan untuk dipinjamkan ataupun diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bahan perbandingan, Indonesia sebetulnya bisa belajar lebih banyak dari negara tetangga, misalnya Singapura yang menjalankan "Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)" atau *Employee Providence Fund* di Singapura. Hasilnya adalah perolehan keuntungan lebih dari 40%, dari dana yang dikelola. Kesuksesan yang mereka raih karena lembaga dana pensiun ini benar-benar menjalankan amanah yang dibebankan para kliennya. Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Lihat saja skandal dana Jamsostek dan skandal dana Taspen yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan para klien terhadap lembaga dana pensiun. Suatu pelajaran penting bagi para pengelola dana pensiun di Indonesia agar mereka dapat bersikap lebih profesional dalam mengelola bisnis yang berasaskan kepercayaan ini.

Alternatif Pensiun dan Tetap Produktif

Bagi sebagian orang, menjadi tua bukanlah sebuah alasan untuk berhenti bekerja. Namun, kemauan para lansia untuk bekerja ternyata juga menimbulkan persoalan. Permasalahan yang dihadapi oleh para lansia yang bekerja adalah tindakan diskriminasi. Kebanyakan orang percaya bahwa lansia itu akan bekerja lebih lambat, kurang efisien, kurang bisa beradaptasi dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Akibatnya, bila yang tua diperbandingkan dengan yang masih muda, maka yang tua akan kalah bersaing. Jelas kandidat yang lebih muda yang bisa memperoleh posisi itu.⁸

Penerimaan pensiun akhirnya menjadi sebuah "mata pencaharian" yang dapat diandalkan oleh para lansia tersebut. Makna sebenarnya dari 'dana pensiun' bukan berarti menerima tabungan hasil jerih payah kita di masa lalu, namun seyogyanya dalam bentuk investasi yang lain di mana para lansia masih bisa aktif menghasilkan uang. Salah satunya adalah melalui sebuah program yang ditelurkan oleh BKKBN yang disebut sebagai program Bina Keluarga Lansia (BKL). Tujuan dari pro-



Dok. YJP

gram ini adalah agar para lansia tetap bisa beraktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Program ini menjadi semacam pinjaman lunak yang dilakukan secara bergulir. Aktivitas yang dijalankan tidak berbeda dengan usaha-usaha kecil yang ada selama ini. Para lansia diberi kesempatan untuk melaksanakan usaha yang dekat dengan hobinya seperti berkebun, beternak ataupun melakukan usaha kerajinan.

Disini para perempuan lansia juga bisa mengambil peranan. Kegiatan tersebut bisa mengurangi ketergantungan para perempuan lansia kepada dana pensiun suami mereka. Dari hasil penelitian memperlihatkan suatu gambaran 38,7% perempuan yang hidup sendiri tanpa suami ternyata lebih tinggi daripada mereka yang masih berstatus istri. Hal ini sekaligus menjadi tuntutan bagi perempuan agar dapat mengelola sumber keuangan mereka secara mandiri.

Sebenarnya, berbisnis pada usia tua bukanlah menjadi masalah, sepanjang segi fisik maupun psikologis mereka masih berjalan dengan baik. Justru dengan aktif dalam kegiatan ekonomi akan membuat para lansia bisa dianggap mempunyai peran yang lebih berarti. Produktivitas yang menjadi ukuran eksistensi seseorang juga akan dapat dirasakan manfaatnya oleh para lansia. Dengan menjalani aktivitas ekonomi maka seorang lansia akan merasa dirinya menjadi lebih *usefull*, tidak seperti mitos yang selama mengatakan bahwa lansia cenderung *useless*, merepotkan dan menjadi beban bagi keluarga yang lebih muda.

Jaminan hari tua untuk Perempuan

Seperti diketahui bahwa perempuan adalah juga bagian dari lansia yang rawan terhadap sindroma dimensia *alzheimer*, yaitu sebuah sindroma yang ditandai dengan kemunduran kemampuan kognitif. Sindroma ini juga memperlihatkan menurunnya daya ingat, intelektualitas, psikis serta perilaku. Hal ini mengakibatkan penurunan fungsi organ-organ tubuh secara menyeluruh dan membuat para lansia lebih rentan rawan terhadap serangan berbagai penyakit, seperti *stroke* yang sangat banyak terjadi pada kalangan lansia.

Fenomena ini dengan sangat tepat dibidik oleh para penyelenggara lembaga dana pensiun. Saat ini rupanya lembaga dana pensiun swasta tidak hanya menyediakan pelayanan tabungan hari tua dalam bentuk *cash* saja. Banyak diantara mereka yang menyediakan layanan khusus bagi perempuan. Salah satunya adalah dengan menyediakan jaminan kesehatan di hari tua. Mereka memberikan jaminan kesehatan kepada perempuan secara lebih spesifik. Seperti diketahui, perempuan lebih rawan terhadap penyakit kanker. Maka lembaga dana pensiun swasta juga menyediakan jaminan khusus untuk penyakit kanker dan juga penyakit-penyakit lain yang biasa dialami oleh perempuan. Hal inilah yang seharusnya menjadi kewaspadaan baru bagi perempuan serta menyadari bahwa kenyataannya, tubuh mereka memang sangat rentan terhadap berbagai ancaman penyakit. Keberadaan asuransi akan sangat menolong karena jaminan dana kesehatan untuk mereka sudah tersedia.

Dari sisi jumlah, lansia perempuan lebih banyak jumlahnya dari laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki. Angka harapan hidup untuk perempuan Indonesia menurut sensus penduduk tahun 1998 adalah 67 tahun, sedangkan angka harapan hidup laki-laki "hanya" 63 tahun. Sudah pasti bahwa perbedaan angka ini harus menjadikan perhatian tersendiri.

Selain itu, perempuan di Indonesia juga masih banyak yang tergantung secara ekonomi kepada para suami. Hal inilah yang seringkali mengakibatkan perempuan tidak terlalu leluasa membuat *social security saving* untuk masa tuanya. Tak dapat dipungkiri bahwa perempuan lansia dinilai mempunyai karakter yang lebih spesifik karena mayoritas mereka hidup dengan penghasilan dan kekayaan yang sedikit. Tidak terlalu mengherankan jika banyak perempuan lansia yang hidup sendirian, bahkan banyak dari mereka yang hidup terasing dari lingkungan sosial atau lingkungan keluarganya.

Dengan banyaknya kelemahan dari perempuan lansia, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang bisa meningkatkan standar hidup mereka dan menjamin mereka di hari tua. Jaminan tersebut bisa dituangkan lewat UU jaminan kesehatan yang bisa memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan untuk memperoleh fasilitas kesehatan.

Tanggung Jawab Masyarakat

Bagaimana dengan masyarakat lansia yang tidak bisa menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai tabungan di hari tua? Untuk menghadapi masalah ini, masyarakat juga harus ikut berperan serta. Dana jaminan untuk hari tua atau *social security saving* bisa dikumpulkan melalui masyarakat yang lebih mampu, para pengusaha ataupun dana gotong royong yang dikumpulkan dari masyarakat sendiri. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi para lansia. Dana tersebut bisa dikelola oleh masyarakat sendiri melalui yayasan-yayasan sosial, ataupun dikelola lewat lembaga dana pensiun milik pemerintah maupun swasta.

Dibandingkan dengan negara lain, seperti Hongkong misalnya, Indonesia masih sangat tertinggal dalam menghadapi permasalahan lansia. Di Hongkong, pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan fisik yang cukup. Fasilitas panti werda tidak hanya semata-mata menyediakan kebutuhan fisik, namun juga menyediakan kebutuhan psikologis para lansia. Selain itu, budaya masyarakat setempat juga sangat menghormati golongan lansia, sehingga mereka merasa sangat dihargai dan diperhatikan.

Indonesia mungkin juga bisa belajar dari Singapura, Jepang dan Taiwan, karena ketiga negara ini menyediakan anggaran khusus untuk memberikan jaminan kesehatan kepada para penduduk lansia. Dana untuk jaminan kesehatan terkumpul dari kesertaan wajib askes bagi seluruh penduduk dengan membayar premi sesuai persentasi gaji per bulan, dan bagi penduduk yang miskin preminya ditanggung oleh negara. Akibatnya, penduduk tidak perlu lagi membayar biaya kesehatannya secara *cash*, seperti apa yang terjadi di Indonesia selama ini. Lebih dari 84% masyarakat kita harus menyediakan dana tunai untuk keperluan pengobatan. Jika cara ini terus dipertahankan, maka masyarakat akan menjadi semakin miskin karena terlalu banyak mengalokasikan biaya hidupnya untuk membayar dana kesehatan.⁹

Ada baiknya juga pemisahan keuangan secara independen, yaitu dengan memisahkan anggaran sehari-hari dengan anggaran untuk *saving* di usia tua. Di atas semuanya, dukungan keluarga adalah yang utama dan masih sangat diperlukan pada saat lansia masih melakukan aktivitasnya di samping mengingatkan para lansia agar tidak bekerja secara berlebihan.

Memilih dari sekarang

Paparan di atas kiranya menjadi suatu pertimbangan bahwa perempuan lansia harus mempunyai tabungan hari tua. Ada banyak tawaran yang diberikan oleh perusahaan perbankan dan asuransi untuk pengelolaan dana pensiun. Oleh sebab itu ada baiknya untuk mempersiapkan masa tua. Bukan hanya sebagai sebuah "dana jaga-jaga", namun lebih kepada sebuah investasi masa depan. Bijak memilih sesuai dengan kebutuhan sekarang dan juga masa yang akan datang. Tak peduli di mana pun kita tinggal nanti, tidak ada salahnya merencanakan masa tua sejak sekarang. Sebuah investasi untuk jangka panjang, tidak akan pernah sia-sia.

Catatan Belakang:

- ¹ Dr. E. Oswari, DPH, **Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar dan Bahagia** (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 10
- ² Ibid., hal 95
- ³ Saeful Millah, "Lansia, Tantangan Baru Kependudukan Indonesia", *Media, Indonesia*, 27 Mei 2002
- ⁴ Untuk lebih lengkapnya lihat Arber, Sara and Jay Ginn, **Gender and Later Life: A Sociological Analysis of Resources and Constraints** (London: Sage Publications, 1993)
- ⁵ Ibid., hal 80
- ⁶ Ibid., hal 85
- ⁷ Ibid., hal 85
- ⁸ Perlmutter Marion, **Adult Development and Aging** (John Wiley & Sons Inc, 1992), hal. 401
- ⁹ "Jamsos Bagi Lansia", *Bali Post*, 2 Juni 2002

Daftar Pustaka

1. Freeman, Sheila and Helene Richard, *Money Management for Woman*. Sydney: UNSW Press, 1999
2. www.taspen.com
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
4. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
5. http://www.zipworld.com.au/~ownsw/why_older_women.Htm
6. Macdonald, Barbara and Cynthia Rich, *Look Me In the Eye: Old, Aging and Ageism*. San Fransisco: Spinters Book Company, 1991.
7. Bell J. Marylin; *Women as Elders: The Feminist Politics of Aging*. London: Harrington Park Press, 1986.

INFORMASI PINDAH KANTOR

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Kami pindah efektif ke alamat baru
mulai bulan Agustus 2002:
Tebet Barat VIII No. 27
Jakarta Selatan
Telp. 021-8302434, 83702005
Fax. 021-8302434

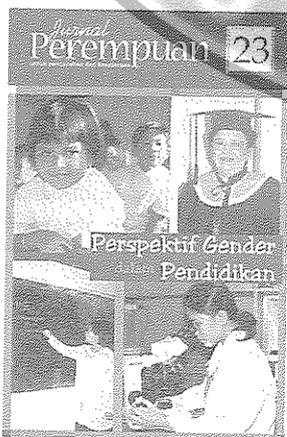


Tahukah Anda bahwa isu-isu di bawah ini sangat berkaitan dengan perempuan..?



Setiap tahun kita menyaksikan kesibukan yang sama; persiapan perkawinan, melahirkan anak dan membesarkannya. Benarkah kehidupan perkawinan seindah bunga-bunga dan gaun pengantin? Bagaimana dengan cacian, benturan, tamparan, dan anak yang meraung-raung melihat orang tuanya berpisah?

Sejauh mana hukum di Indonesia telah melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan? Tema-tema seputar keputusan melajang, makna perkawinan bagi kalangan marjinal, hukum perkawinan dan perceraian, serta masih banyak lagi, dikupas dalam Jurnal Perempuan edisi ini.



Paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam pendidikan di Indonesia, angka partisipasi pendidikan yang masih lebih rendah ketimbang laki-laki, serta persoalan bias gender dalam kurikulum. Tulisan-tulisan dalam Jurnal Perempuan kali ini akan mengungkapkan bagaimana kebijakan publik, kurikulum, matematika dan bahkan kitab kuning sekalipun, sering kali memojokkan perempuan di dalamnya.

Padahal kita tahu pendidikan seharusnya berlaku bagi semua jenis kelamin. Lalu dimanakah letak kesalahan pendidikan di Indonesia? Temukan jawabannya pada Jurnal Perempuan edisi 23.

Kebijakan Publik Untuk Lansia Peraturan Minus Pelaksanaan

Pasal 12

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
- d. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- e. Perlindungan sosial

Pasal 17

Ayat (2)

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- a. Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.
- b. Pemberian kemudahan dan keringanan biaya
- c. Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan
- d. Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus

Ayat (3)

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)

Dalam Undang-Undang tersebut terungkap jelas bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia sudah menyediakan perangkat hukum untuk menjamin keberadaan para lanjut usia. Namun, ternyata masih banyak dari pasal-pasal kesejahteraan lansia itu yang tidak jelas implementasinya.

Ketidakjelasan pelaksanaan Undang-Undang itu salah satunya terlihat dalam hal asuransi kesehatan. Sampai dengan bulan Juni 2002, tercatat 80% dari 22 juta lansia Indonesia tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena para lansia tidak mempunyai asuransi kesehatan. Padahal, lansia adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit berat seperti tekanan darah tinggi, jantung, kencing manis dan sebagainya, yang tentunya membutuhkan biaya yang relatif mahal. Selama ini, para lansia biasanya hanya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang murah yang disediakan di puskesmas. Bagi lansia yang tergolong mampu, akses ke fasilitas kesehatan mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Idealnya, dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan bagi lansia, pemerintah menyediakan asuransi kesehatan khusus untuk lansia, terutama yang tidak mampu. Premi dari asuransi tersebut bisa ditanggung oleh negara ataupun subsidi dari orang-orang yang masih aktif bekerja.

Begitu pula dengan jaminan sosial bagi lansia. Ketika lansia sudah menjadi tidak produktif, alangkah idealnya kalau pemerintah memberikan jaminan sosial berupa pensiun. Di negara-negara Eropa, para lansia ini biasanya mendapatkan pensiun dari negara yang sesuai dengan biaya hidup di negara yang bersangkutan. Dengan demikian para lansia tetap dapat hidup secara layak. Untuk Indonesia sendiri, hal tersebut belum bisa dilakukan karena pemerintah tidak mempunyai dana. Untuk membayar asuransi kesehatan bagi para lansia Indonesia, sedikitnya pemerintah harus menganggarkan sedikitnya 400 triliun rupiah pertahunnya.

Dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan lanjut usia juga disebutkan bahwa para lansia dijamin tetap bisa menjalankan mobilitasnya dengan segala keterbatasan fisik mereka. Namun, kita bisa melihat sendiri bagaimana fasilitas publik di Indonesia sangat diskriminatif terhadap keberadaan para lansia. Angkutan umum misalnya, didesain untuk orang-orang yang bertubuh sehat. Sehingga mustahil bagi orang tua untuk bisa duduk dengan nyaman di bis kota atau angkutan umum lainnya. Fasilitas kemudahan angkutan umum untuk lansia selama ini masih dalam kisaran harga tiket. Para lansia biasanya hanya membayar 50% dari harga tiket pesawat, kapal laut dan kereta api. Namun, untuk angkutan keseharian seperti bis kota, tidak ada perbedaan harga. Padahal didalam penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-undang tentang lanjut usia disebutkan bahwa fasilitas publik harus memberikan kemudahan aksesibilitas kepada lansia. Yang dimaksud dengan aksesibilitas disini adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat umum seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga dan lift yang khusus ataupun tempat menyeberang yang khusus. Dalam keseharian, mungkin tempat-tempat yang menyediakan fasilitas itu bisa kita hitung dengan jari. Padahal, dalam pasal 26 Undang-undang tersebut nyata-nyata disebutkan bahwa institusi yang tidak menyediakan pelayanan sosial tersebut diancam dengan pidana kurungan selama satu tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya 200 juta rupiah. Kalau undang-undang ini benar-benar dilaksanakan, berapa saja perusahaan angkutan atau institusi yang menggunakan gedung bertingkat akan mendapatkan sanksi?

Seperti telah diungkap diatas bahwa perlu perangkat perundangan yang lain untuk mendukung terlaksananya undang-undang itu. Dan, dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya sudah sensitif dengan masalah lansia ini. Saat ini, rata-rata daerah belum mempunyai perda (peraturan daerah) tentang lansia. Pemerintah DKI Jakarta misalnya, saat ini baru akan menyusun perda yang bisa menjamin para lansia di Jakarta bisa mengakses segala fasilitas publik seperti transportasi, bank, kantor pos maupun pusat perbelanjaan.

Daftar Pustaka:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. http://www.fes.or.id/art001_keberhasilan.html
3. "Jamsos Bagi Lansia Miskin", *Bali Post*, Minggu Wage, 2 Juni 2002

Masyarakat Dunia Berusia Semakin Tua, Perempuannya hidup lebih lama dibandingkan Laki-laki

Dewasa ini 1 dari 10 orang yang ada di dunia ini berusia di atas 60 tahun. Dan umumnya mereka adalah perempuan. Ini pada dasarnya merupakan indikasi bahwa masyarakat, khususnya kalangan perempuannya, memiliki kehidupan yang lebih lama di setiap penjuru dunia.

Data statistik terakhir yang dikeluarkan oleh PBB memperlihatkan bahwa jumlah orang di atas usia 60 tahun, yang diperkirakan dewasa ini berjumlah sekitar 605 juta jiwa, diprediksikan akan meningkat dua kali lipat, yakni sekitar 1,2 milyar jiwa di tahun 2025. Bagi mereka yang tinggal di negara-negara berkembang diharapkan akan diperhitungkan mencapai hampir sekitar $\frac{3}{4}$ dari jumlah yang diprediksikan tersebut.

Penjelasan-penjelasan di balik kecenderungan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam laporan *United Nations Population Fund*, adalah rendahnya tingkat kematian bayi dan anak-anak, gizi yang lebih baik, pendidikan, pelayanan kesehatan, akses kepada keluarga berencana, dan harapan hidup yang lebih panjang.

Menurut *State of World Population (SWP)*, 2000, dewasa ini perempuan hidup lebih lama dibandingkan laki-laki, dan ini berkaitan dengan harapan hidup mereka yang meningkat dengan cepat.

Laporan yang belum lama ini diluncurkan oleh *United Nations Population Fund (UNFPA)*, menunjukkan bahwa, "Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam harapan kehidupannya adalah merupakan sebuah perpaduan antara perbedaan biologis seperti tingkat yang rendah terhadap rentannya terkena penyakit jantung sebelum menopause, dan alasan-alasan budaya seperti tingkat tindakan laki-laki yang lebih besar dalam kaitannya dengan resiko-resiko pekerjaan.

Sekurang-kurangnya di 33 negara di dunia, tingkat harapan hidup bagi perempuan saat ini melampaui usia 80 tahun. Masyarakat yang berusia di atas 80 tahun adalah segmen dari masyarakat berusia lanjut yang paling cepat pertumbuhannya.

Sementara kalangan perempuan dapat memandang suatu kehidupan yang lebih lama dibandingkan laki-laki, tapi pada saat bersamaan mereka juga tetap melanjutkan penderitaan akibat dari diskriminasi gender meskipun di dalam usia lanjutnya.

Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan menyusul penemuan-penemuan yang diungkapkan dalam laporan SWP tersebut.

- Meskipun jumlah yang besar dari perempuan lanjut usia dewasa ini, tapi pada dasarnya perempuan menerima dukungan program pemerintah lansia yang paling sedikit dibandingkan laki-laki. Ini berhubungan dengan sistem pensiunan publik yang dirancang dengan suatu asumsi bahwa laki-laki adalah pencari nafkah ekonomi yang utama.
- Kehidupan sebagai janda di kalangan perempuan bersifat lebih merata, dan ini disebabkan

karena mereka hidup lebih lama dan juga biasanya laki-laki suaminya berusia lebih tua dibandingkan mereka. Mereka sendiri jarang yang kemudian menikah kembali (berbeda dengan laki-laki) dan umumnya mereka hidup sendiri.

- Perempuan lanjut usia sendiri jarang mendapatkan dukungan dari keluarga mereka karena adanya asumsi yang mendasarinya bahwa mereka memang tidak terlalu pantas mendapatkan dukungan tersebut.
- Perempuan menderita karena tingkat ketidakmampuan (*disability*) yang tinggi dalam usia tua, dan ini disebabkan karena rendahnya perawatan kesehatan mereka, dan demikian juga dengan pendidikan dan gizi mereka pada awal-awal kehidupan mereka.
- Perempuan lanjut usia pada umumnya lebih miskin dibandingkan dengan laki-laki lanjut usia, dan ini sebagai akibat dampak yang terakumulasi dari penghasilan yang rendah seumur hidup mereka, demikian juga dengan rendahnya uang pensiun, status sosial dan akses terhadap hak milik (pemilikan) dan warisan.

Disamping hal-hal tersebut, laporan ini juga menambahkan bahwa beban perawatan atas orang-orang lanjut usia ternyata lebih besar terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Sementara kehidupan yang lebih lama dikatakan sebagai satu prestasi utama di Abad 20, maka PBB dewasa ini mencanangkan dengan menambahkan bahwa, "kualitas kehidupan dalam tahun-tahun yang diperpanjang" adalah satu tantangan utama di abad yang baru.

Untuk meningkatkan kesadaran atas isu-isu lansia, maka setiap tanggal 1 Oktober dicanangkan sebagai "Hari International bagi Orang-orang Lansia" (*International Day of Older Persons*).

Dalam pesannya yang menandai hari tersebut, Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, mengatakan, "Masyarakat di negara-negara berkembang ternyata bertambah tua lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di negara-negara maju, dan mereka memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengantisipasi berbagai konsekuensinya. Mereka dapat belajar dari pengalaman negara-negara maju yang sudah mengantisipasi peningkatan secara signifikan rata-rata usia penduduknya."

SWP sendiri melaporkan bahwa para pembuat keputusan di negara-negara maju sangat menaruh perhatian terhadap kebutuhan kesehatan dan pendanaan masyarakat lanjut usia.

Dikatakan bahwa, "Perhatian diarahkan kepada aturan pengunduran diri bagi mereka yang lanjut usia (termasuk di dalamnya kemungkinan untuk melanjutkan kerja), penataan kembali sistem pensiun, tinjauan atas program perawatan jangka-panjang dan pelayanan kesehatan, dan membangun sistem dukungan komunitas bagi orang-orang lanjut usia."

Pada saat yang bersamaan diperkirakan bahwa bertambahnya usia masyarakat akan berjalan secara lambat di negara-negara di mana tingkat fertilitas dan kematian masih sangat tinggi (NIS).

(Disadur secara bebas dari surat kabar Filipina, *Today*, 15 Oktober 2000, sebagaimana dikutip oleh majalah *Women in Action*, no. 3, 2000)

